

Sejarah Sosial Politik Mesir Kontemporer Periode Sadat dan Mubarak

Sukron Kamil*

Abstract: Gamal Abdul Nasser and Anwar Sadat were Egypt presidents developed secularism. But, they are deferent in ideology and political policy. Nasser's policy closes to Russia and his ideology is Arab Socialism, whereas Sadat's policy closes to United States of America which its ideology is Capitalism. This impacts to Egypt culture where modern western culture developed, such as nightclubs, pubs, etc. on the other hand the people welfares abandoned. This condition makes Islamic fundamentalism movements arise, such as Jama'ah Islamiyah and Tanzim al-Jihad.

Kata Kunci: Free Officer, fundamentalis Islam, dan sekularisme.

STUDI bahasa dan sastra di perguruan tinggi Indonesia, termasuk di dalamnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, terlalu rigid dengan disiplin ilmu bahasa dan sastranya. Hal itu antara lain bisa dilihat dari tidak adanya mata kuliah Sejarah Sosial Politik dan Budaya Arab Moderen misalnya pada Jurusan/Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (termasuk di dalamnya program studi Tarjamah), baik di bawah Fakultas Adab dan Humaniora, maupun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang kurikulumnya memang lebih padat, karena harus

*Jurusan/Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

menyahuti ilmu keguruan. Ini berarti sistem pendidikan di Indonesia secara umum terlalu terikat oleh tradisi monodisipliner. Padahal sistem pendidikan Belanda sendiri, yang sebelum berubah menjadi rujukan Indonesia, sejak 1976 telah meniadakan model monodisipliner dengan mengembangkan program S2 dan S3 interdisipliner (antar bidang). Sistem pendidikan interdisipliner, termasuk di dalamnya sastra, awalnya digagas Amerika Serikat, tetapi di sana interdisipliner tidak menjadi nama tambahan program studi atau nama tersendiri, karena program pendidikan di AS adalah antar bidang.¹ Demikian juga di Australia seperti di Universitas Melbourne, di mana studi Bahasa dan Sastra Arab di bawah program studi Arabic Studies dan kurikulumnya tidak melulu bahasa dan sastra, tetapi juga budaya, politik, dan sejarah Arab.²

Akibat dari kuatnya pandangan dan praktik monodisipliner dalam studi bahasa dan sastra itu, maka mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab, juga Tarjamah, hanya menguasai aspek kebahasaan dan sastra

Arab saja. Mereka kesulitan memahami bahasa dan sastra dalam konstruk politik dan budaya Arab. Itu berarti studi bahasa dan sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kurang menyahuti tuntutan pasar. Tuntutan dunia diplomatik yang diminta Departemen Luar Negeri tidak disahuti. Wajar jika belakangan, alumni Bahasa dan Sastra Arab umumnya gagal dalam seleksi pegawai di departemen tersebut. Pasalnya, kendati kemampuan bahasa Arab mereka bagus, tetapi mereka tidak mampu menjelaskan isu-isu politik terkini dunia Arab kontemporer.

Selain faktor tradisi monodisipliner juga minimnya literatur. Meski belakangan literatur Asia Barat, terutama dunia Arab, dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan, tetapi tampaknya masih sangat kurang. Tulisan ini akan membahas sekilas perkembangan sosial politik Mesir kontemporer pada periode Sadat dan Mubarak, sebagai bagian dari dunia Arab. Tujuannya untuk menstimulir berkembangnya studi bahasa dan sastra Arab interdisipliner dan

diharapkan ikut memperkaya literatur Asia Barat, terutama dunia Arab.

Selain itu, Mesir modern tampaknya merupakan mata air bagi gerakan sosial politik Islam di Indonesia, baik bagi sayap liberal maupun fundamentalis (radikal). Berkembangnya tulisan-tulisan Hasan Hanafi dan M. Said al-Asyrawi yang liberal, munculnya Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwan al-Muslimin, dan Jama'ah Islamiyah yang fundamentalis menunjukkan hal itu. Karenanya, meski hanya disinggung sepintas, tulisan ini dimaksudkan sebagai awal untuk menelusuri asal usul pemikiran dan gerakan itu.

Sosial Politik Mesir Periode Sadat (1970-1981)

Kemunculan Sadat dalam kancah politik Mesir berawal dari keterlibatannya dalam gerakan revolusi yang awalnya bergerak di bawah tanah yang kemudian dikenal dengan gerakan Para Perwira Bebas (*al-Dubbāt al-Ahrār*). Gerakan ini dipimpin M. Najib, Jamal Abdul Nasser, dan Anwar Sadat. Dalam sejarah Mesir modern, sebagaimana

Ikhwan al-Muslimin yang didirikan Hasan al-Bana (1906-1949) pada 1928, keberhasilan gerakan tersebut dipicu kekalahan Mesir di bawah raja Faruq (1936-1952)³ beserta Partai Wafd⁴ (yang mengukung demokrasi liberal dan sekularisme) dari Israel dalam perang 1947 dan menyebarnya korupsi dalam rezim tersebut. Pada 23 Juli 1952, Gerakan Perwira Bebas (*Free Officer*) berhasil mengubah politik Mesir dengan menggulingkan raja Faruq dan mengakhiri rezim parlementer. Mereka adalah pemenang dalam pergolakan tiga kubu dalam akhir periode liberal Mesir: yaitu generasi sekular tua yang dipimpin Partai Wafd, reformis Islam, kelas bawah yang dikoordinasi Ikhwan al-Muslimin, dan mereka sendiri sebagai generasi militer baru yang terdidik dalam teknik kemiliteran. Mereka menandai untuk pertama kalinya, sejak penaklukan Persia di bawah Cyrus Agung pada 525 SM,⁵ bangsa asli Mesir mampu mengambil alih pemerintahan. Setelah raja turun tahta dan digantikan Fuad II, pada 1953 sistem monarki dihapus.

Gerakan yang sering disebut Revolusi 1952 itu mengantarkan M. Najib sebagai presiden dan perdana menteri. Namun, pada 1954, Jamal Abdul Nasser mengambil alih kendali pemerintahan. Salah satu sebabnya adalah keinginan M. Najib mengembalikan Mesir pada sistem pemerintahan parlementer dengan sistem politik demokrasi liberal sebagaimana sebelumnya dan mengakhiri sistem pemerintahan militer.⁶ Nasser memperkenalkan sistem pemerintahan militer dengan ideologi sosialisme Arab,⁷ tetapi tetap memegang teguh doktrin sekular yang telah berkembang sebelumnya, berkuasa hingga 28 September 1970. Ia meninggal karena serangan jantung.⁸ Sebagai orang ketiga dalam Revolusi 1952, Anwar Sadat kemudian menggantikannya.

Setelah berkuasa, Sadat tampil dengan agenda utama melakukan pemulihan hubungan politik dan kultural dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, yang terputus pada periode Nasser. Karena itu, ia dinilai telah membangkitkan kembali hasrat bangsa Mesir awal abad ke-20 (sejak

periode Liberal) agar dipandang sebagai negeri Barat.

Berbeda dengan Nasser, kebijakan ekonominya adalah sistem ekonomi campuran/peningkatan investasi swasta. Pada 1974, Sadat memberlakukan kebijakan *infitāh* (terbuka), yaitu membuka pintu bagi investasi asing, khususnya sektor perbankan dan minyak. Untuk merangsang tumbuhnya investasi, ia memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan baru milik asing sekalipun. Port Said dinyatakan sebagai pelabuhan bebas. Kebijakan ini sejalan dengan persukutuanannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arab konservatif, terutama Saudi Arabia.

Hasilnya antara lain lahirnya banyak jutawan di Mesir. Pada 1975 misalnya mereka berjumlah 500 orang dan 1981 sekitar 17.000 orang. Namun, kesejahteraan masyarakat yang terus menerus bergantung pada ekspor minyak, pariwisata, bea cukai Terusan Suez, dan kiriman uang para pekerja di luar negeri membuat Mesir mengalami kebangkrutan ekonomi. Hutang luar negerinya semakin besar.

Atas saran International Monetary Fund (IMF), Sadat pada 1976 bermaksud memotong subsidi bahan makanan pokok, walaupun kemudian dibatalkan atas desakan rakyat. Pada akhir 1970-an, kehidupan ekonomi bagi rakyat umumnya tidak bertambah baik, inflasi tidak kunjung turun. Orang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.

Meskipun Mesir pada masa Sadat telah menerapkan kebijakan *infitāh*, tetapi secara umum masih mempertahankan sistem perekonomian masa Nasser. Jadi, sistem ekonomi yang dipakai sesungguhnya bukan kebalikan dari sosialisme, tetapi kapitalisme semu. Dalam beberapa hal, ekonomi ditentukan oleh sistem pasar, tetapi dalam banyak hal ditentukan/didominasi negara. Kebijakan ini memang telah mendorong hadirnya sejumlah bank asing, perusahaan bersama, dan melahirkan elite baru terdiri atas kalangan importir-eksportir, kontraktor, dan spekulan usaha perumahan. Namun, di sisi lain dominasi Sadat dalam kebijakan ekonomi membuat ekonomi Mesir sangat rentan dari per-

limbangan politik pragmatik. Sejumlah tanah pada masanya diberikan kepada perkongsian insinyur pertanian, para petani, dan dijual secara lelang kepada penawar tertinggi yang memungkinkan kalangan industrialis menghimpun tanah agribisnis.⁹

Dalam politik luar negeri, Sadat menjadi bintang baru dalam konstalasi politik Timur Tengah karena serangannya terhadap Israel. Pada 6 Oktober 1973, pasukan Mesir atas perintah Sadat dan pasukan Suriah serentak menyerang Israel untuk merebut daerah yang didudukinya. Jika pasukan Mesir bergerak menuju Sinai, maka Suriah menyerbu Dataran Tinggi Golan. Awalnya berhasil, tetapi kemudian Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir dan Suriah. Atas prakarsa Persekutuan Bangsa-Bangsa/PBB gencatan senjata dilakukan. Hasilnya, pada 1974 Israel bersedia menarik pasukannya dari sekitar Terusan Suez, sebagian Semenanjung Sinai, dan Abu Rudeis yang menghasilkan minyak. Imbalannya, Mesir memperbolehkan perdagangan non-militer Israel

melewati Terusan Suez. Perang ini tidak membuat Mesir memperoleh seluruh wilayah yang diduduki Israel. Seluruh wilayahnya baru diperoleh kembali, walaupun dalam 3 tahap,¹⁰ setelah penandatanganan Perjanjian Camp David 1978 yang kontroversial. Perjanjian ini dilakukan presiden Anwar Sadat dengan PM Israel, Menachem Begin, berkat inisiatif presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.

Akibatnya, beberapa negara Arab memutuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk protes dan penolakan. Namun, pemerintah Sadat berpandangan bahwa hanya dengan perdamaian Mesir memperoleh kembali wilayah yang diduduki Israel pada 1967. Mesir pun kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel.¹¹

Selain itu, di balik perjanjian Camp David 1979 itu, negeri ini menerima bantuan dari Amerika Serikat sebesar 10 milyar US \$. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat jarang mengkritik kebijakan domestik Mesir. Mesir di bawah Sadat adalah negara yang menjadikan politik luar

negerinya sebagai komoditi.¹² Sebagaimana Nasser, Sadat menjadikan Mesir sebagai negara tipologi sekular yang menganut apa yang oleh Nur-cholish Madjid disebut dengan Islam Yes. Partai Islam No. Artinya, Islam diperbolehkan hidup selama dipraktikkan dalam bentuk ritual dan kultural atau selama sebagai identitas yang tidak menyentuh kepentingan politik. Sadat atau sebelumnya Nasser, simbol Islam digunakan untuk mendapatkan legitimasi politik. Jika Nasser menjustifikasi proyek sosialisme Arabnya dengan Islam, Sadat karena dianggap lebih religius memperoleh gelar *Amir al-mu'minin* (pemimpin orang-orang mukmin) sebagaimana raja Hasan dari Maroko. Meskipun Sadat acap kali mengidentifikasi dirinya sebagai Fir'aun Mesir terakhir, tetapi ia menempuh politik pencitraan dengan sengaja menunjukkan dirinya kepada publik Mesir sebagai Muslim yang ta'at. Secara teratur, Sadat difoto ketika sedang menjalankan salat Jum'at dan ia pun banyak mendirikan masjid.¹³ Selama masa pemerintahannya, Sadat memperkenalkan

kan pasal dalam konstitusi 1971 yang mengatakan bahwa syaria'ah merupakan sumber konstitusi Mesir dan teori evolusi Darwin yang dianggap mementahkan kesucian manusia pertama, nabi Adam as, sempat dihapuskan dalam kurikulum.

Sadat membawa rezimnya ke garis kanan di semua level guna membendung pengaruh Nasser dan unsur-unsur kiri. Ia mewarisi Mesir yang kalah perang dari Israel dan tidak populer merehabilitasi Ikhwan al-Muslimin yang mengakar di massa rakyat. Pada 1971 Sadat membebaskan ribuan anggota Ikhwan yang dipenjara pada masa Nasser. Kurang dari lima tahun setelah eksekusi terhadap Sayyid Qutb pada 1966, Ikhwan, dalam bentuknya yang moderat, kembali lagi berperan dalam kehidupan masyarakat Mesir. Ikhwan ikut dalam kampanye de-Nasserisasi yang menyerang sosialisme dan otoritarianisme. Meski begitu, Sadat tetap menolak memberi Ikhwan status legal sebagai organisasi sukarela swasta yang terdaftar di Kementerian Sosial.

Setelah perang Oktober 1973, persekutuan dengan kelompok Islam politik diperkuat melalui perantaraan teman Sadat, M. Usman Isma'il yang bermigrasi ke Saudi Arabia karena represi Nasser. Usman Isma'il kembali ke Mesir dalam keadaan makmur. Melalui Usman Ismail, Sadat memperkuat hubungannya dengan Saudi Arabia yang memberikan dukungannya pada kelompok-kelompok dan lembaga Islam. Dukungan Saudi Arabia membuat peredaran literatur *twās* (khazanah intelektual Islam klasik dan pertengahan) menjadi massal dan pers Islam seperti *al-Da'wah* milik Ikhwan yang pada masa Nasser dilarang dihidupkan kembali. Setelah perang Oktober, Sadat memberikan angin bagi partai kiri untuk beroperasi. Sadat adalah orang pertama yang mencoba mendemokratisasikan kembali sistem politik Mesir, setelah kosong beberapa dekade.

Namun demikian, akomodasi dan persekutuan diam-diam antara Sadat dan Ikhwan akhirnya bubar, ketika ia menandatangani Perjanjian Camp David 1979 yang me-

nurut Islam politik mengorbankan Jerussalem dan Palestina. Faktor lain bubarnya persekutuan itu adalah politik ekonomi pintu terbukanya yang mengundang investasi Amerika Serikat yang memunculkan banyak *night club*, bar, dan bioskop yang dianggap Ikhwan merusak moralitas Islam. Pada 1977, Ikhwan sempat memporakporandakan beberapa *night club* di Kairo. Kendati begitu, aliansinya dengan elit agama lewat ulama al-Azhar tetap berjalan. Al-Azhar pernah mengeluarkan fatwa yang mengabsahkan keluarga berencana dan perjanjian damai dengan Israel yang terus berlaku hingga masa Mubarak, di mana al-Azhar mengabsahkan keterlibatan Mesir dalam Perang Teluk 1990-1991.¹⁴

Kendati Sadat mengakomodasi Ikhwan al-Muslimin, tetapi tidak membuat kelompok-kelompok Islam garis keras lain mati, justru tumbuh subur. Paling tidak, ada 4 kelompok Islam garis keras yang muncul pada periode Sadat yang dianggap pemimpin Ikhwan kala itu sebagai kelompok *guluw* (berlebihan). Per-

tama, Jama'ah Muslimin (*al-Takfir wa al-Hijrah*). Organisasi ini dipimpin Syukri Mustafa yang sebelumnya adalah anggota Ikhwan. Mustafa mendirikan organisasi ini pada 1971 dengan mengambil doktrin Sayid Qutb. Ia menganggap masyarakat yang tidak menghukumi dengan hukum Allah sebagai masyarakat Jahiliyah yang rusak dan kafir. Untuk itu, ia menyerukan anggotanya untuk melakukan hijrah guna menyusun kekuatan di gua-gua dan celah-celah pegunungan, kemudian kembali untuk mengubah masyarakat Jahiliyah tersebut. Ia membentuk sekelompok pengikutnya yang menarik diri dari masjid-masjid yang berada di bawah kontrol negara, menolak segala bentuk kolaborasi dengan sejumlah masyarakat Mesir, antara lain lembaga peradilan dan sekolah. Bahkan, mereka memberlakukan bentuk perkawinan khusus bagi anggota komunitasnya. Mereka menganggap pemerintah Mesir tidak sah karena tidak menerapkan hukum Islam, dijalankan orang-orang tiran (zalim), dan bersekongkol dengan Zionis, komu-

nis, dan imperialis. Mereka juga mengecam ulama, badan sosial Islam, dan perkumpulan agama yang bekerjasama dengan pihak pemerintah. Anggota kelompok ini pada masa Sadat berjumlah sekitar 3000-5000 orang. Kedua, Jama'ah Syabab Muhammad (Para Pemuda Nabi Muhammad) atau Jama'ah al-Fanniyah al-Askariyah (Kelompok Sekolah Teknik militer). Didirikan pada 1974 oleh Salih Simriyyah dan dikenal karena organisasi ini menyerang Sekolah Teknik Militer tetapi gagal. Kelompok yang menjadikan ideologi jihad untuk mendirikan negara Islam ini memusuhi peradaban dan politik Barat; menganggap kafir pemerintah pro Barat dan mereka yang berafiliasi langsung; menolak filsafat kapitalisme dan sosialisme; dan memandang pendudukan Palestina oleh Israel sebagai pendudukan terhadap kaum Muslimin secara keseluruhan. Organisasi ini beranggotakan sekitar 1000 orang, termasuk mahasiswa Sekolah Akademi Militer. Ketiga, al-Jama'ah al-Islamiyah (Kelompok Islam). Awalnya, kelompok ini menguasai organisasi mahasiswa

dan mulai dikenal sejak 1979. Kelompok ini sangat memusuhi kaum Kristiani di Mesir, menganggap kafir pemerintah yang tidak menggunakan hukum Allah; menilai musyrik legislasi karena legislasi adalah hak Allah; dan mewajibkan pembunuhan terhadap para pejabat atau tokoh yang menolak penerapan syariat. Pada 1979, kelompok ini terlibat dalam permusuhan dengan kaum Kristen Koptik. Kecaman terhadap agresi pihak Kristen dan kerjasama negara dengan komunitas Koptik dilancarkan dan terjadilah kerusuhan Muslim-Kristen. Pada 1981, pemerintah membubarkan kelompok ini. Keempat, Tanzim al-Jihad (Organisasi Jihad). Semula organisasi ini bagian dari Jama'ah al-Fanniyah al-Askariyah, tetapi sejak 1977 berdiri sendiri. Menurut organisasi yang didirikan oleh Abd al-Salam Faraj ini, kekuatan *taghut* (pemerintah setan) tidak akan bisa hilang kecuali dengan kekuatan senjata. Negara dibaginya menjadi dua: *Dār al-Islām* (yang menjunjung tinggi hukum Islam) dan *Dār al-Harb* (negara yang boleh diperangi). Dengan meru-

duk pendapat Ibn Taimiyah dalam *al-Fatāwā al-Kubrā* bab *jihād*, menurut pendiri organisasi ini, memerangi *Dār al-Harb* dalam negara yang tidak menerapkan syari'at Islam adalah *fardu a'in* (wajib bagi setiap Muslim). Berbeda dengan Jama'ah al-Fanniyah al-Askariyah, Tanzim al-Jihad memandang bahwa memengaruhi musuh yang dekat lebih baik daripada yang jauh seperti Israel. Lewat salah satu anggotanya, Khalid Islambuli, seorang kolonel artileri, Tanzim al-Jihad membunuh Sadat pada 6 Oktober 1981. Selain, Abd al-Salam Faraj otak di balik organisasi ini adalah Abbud al-Zumar, seorang mayor angkatan darat yang merancang strategi untuk mendirikan *khilafah* Islam, dan figur spiritual, Syaikh Umar Abd al-Rahman yang memberikan izin untuk membunuh Sadat dengan mengutip QS 5:44-45 yang menganggap kafir pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah.¹⁵

Polarisasi antara Sadat dengan kalangan Islamis (Islam politik) membuatnya pada September 1981 memerintahkan untuk menangkap 16

00 orang pembangkang dari kalangan Islam, komunis, dan liberal, termasuk sastrawan. Di antara sastrawan yang diseret ke penjara adalah Nawal el-Sadawi yang kemudian menulis *Memoirs from the Women's Prison*. Pada 6 Oktober 1981 Sadat terbunuh ketika parade militer oleh 3 orang tentara anggota Tanzim al-Jihad.¹⁶

Sosial Politik Mesir Periode Hosni Mubarak (1981-Sekarang)

Seminggu setelah Sadat terbunuh, Hosni Mubarak tampil sebagai pengganti. Mubarak yang dibesarkan, sebagaimana Nasser dan Sadat, dalam pendidikan dan karier militer, mulai bersinar ketika dirinya sebagai panglima Angkatan Udara dalam perang Arab-Israel 1973. Setelah dilantik menjadi presiden, Mubarak berjanji akan meneruskan kebijakan Sadat, memulihkan keserasian dengan negara tetangga, dan memfokuskan perhatiannya pada reformasi ekonomi ketimbang politik. Mesir pada masa Mubarak juga diterima kembali dalam Liga Arab pada 1989, dan

markasnya kembali pindah ke Kairo setelah sebelumnya di Tunisia. Mubarak berhasil mengembalikan sisa-sisa tanah di gurun Sinai dalam perundingan dengan Israel April 1982 dan melanjutkan hubungan strategis Mesir dengan Amerika Serikat yang dirintis Sadat. Kedekatan Mesir pada periode Mubarak dengan Amerika Serikat tidak diragukan lagi, bahkan Mesir memiliki ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari Amerika Serikat.¹⁷ Pada periode Mubarak, Mesir memimpin negara-negara Arab mengusir Irak di bawah Saddam Hussein dari Kuwait dalam Perang Teluk 1991.¹⁸

Secara formal, Mesir pada masa Mubarak adalah negara republik dengan menganut sistem demokrasi sosial. Kekuasaan dibagi 4 bagian: presiden, kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sistem peradilan. Kenyataannya, semua kekuasaan di tangan presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam referendum untuk periode 6 tahun. Presiden mengangkat dan memberhentikan pejabat 3 lembaga politik lainnya dan

pejabat daerah di 26 propinsi. Pada masa Mubarak, sistem multipartai yang mulai diperkenalkan lagi sejak masa Sadat terus berlaku. Partai yang berkuasa adalah National Democratic Party (NDP) yang saat ini memiliki 311 kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), partai yang didirikan Sadat. Lainnya adalah kekuatan politik yang lemah seperti Neo Wafd yang memiliki 6 kursi di DPR, dan Ikhwan al-Muslimin dari kelompok independen yang memiliki 88 kursi.¹⁹

Mesir adalah negara demokratis yang terbatas, di mana presiden tidak memberikan kebebasan politik penuh sebagaimana sebelum 1952 (periode demokrasi liberal dengan sistem monarki terbatas). Hubungan Mubarak dengan kalangan Islam politik, semula mengakomodasinya. Mubarak melepaskan tahanan politik tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin dan kalangan Islam politik/radikal lainnya yang di-jebloskan ke penjara oleh Sadat pada September 1981. Jumlah mereka sekitar 2/3 dari seluruh tahanan yang totalnya 1500 orang. Ia juga membuka secara luas aktivitas

dakwah dan menambah acara keislaman di radio dan televisi. Belakangan, Mubarak bersikap represif terhadap Islam politik. Menurut laporan organisasi hak asasi manusia/HAM Mesir, saat ini ada sekitar 17 000 politisi dalam penjara dan mayoritasnya dari kalangan Islamis. Sebelumnya (1989), ada sekitar 10.000 aktivis Islam dalam penjara di Mesir.

Hal itu menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi Mubarak adalah kalangan radikal Islam, terutama Jama'ah Islamiyah yang menyelimuti Mesir. Gerakan radikal Islam pada 1990-an meningkat tajam. Aksi-aksi terorisme terus menyelimuti Mesir. Tujuannya adalah untuk melawan pemerintah, pasukan keamanan, cendekiawan, dan wartawan yang menentang ekstrimisme agama. Pada Oktober 1990, Rif'at Mahjub, ketua Parlemen Mesir dibunuh oleh gerakan radikal Islam. Pada Juni 1992, cendekiawan terkenal, Faraj Fuda, dibunuh. Belum lagi serangkaian pembunuhan yang gagal. Antara lain terhadap PM Atip Sidqi pada Nopember 1993, terhadap Safwat al-Syarif, Menteri Komunikasi,

pada Mei 1993, dan atas diri Mubarak sendiri di Addis Ababa, Ethiopia, pada Juni 1995.

Serangan juga dilakukan gerakan radikal Islam terhadap gereja, aset bisnis Koptik, dan para turis yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah, terutama piramid, salah satu sumber devisa utama Mesir. Peristiwa terakhir yang mencengangkan adalah peledakan bom di Syarm al-Syaikh, 23 Juli 2005. Syarm al-Syaikh adalah kota wisata pantai di ujung bawah Semenanjung Sinai yang memiliki hotel berbintang lima, kasino, bar, diskotik, klab malam, lapangan golf, dan fasilitas kesehatan. Karenanya, kawasan ini sering dikunjungi turis internasional dari Eropa, Jepang, dan Israel. Dua bom mobil diletakkan di hotel dan tempat parkir dan satu lagi bom tas yang guncangannya bisa dirasakan hingga 10 km itu telah menewaskan 88 orang dan melukai 200 orang lainnya. Ledakan itu merupakan serangan terbesar kedua sejak 1981, ketika kelompok militan Islam melakukan serangan di bagian selatan kota Asiyut yang menewaskan 120 orang polisi.

Kelompok yang terkait dengan al-Qa'ida pimpinan Abdullah Azzam mengaku bertanggungjawab atas ledakan itu sebagai balasan atas kejahatan Barat terhadap kaum Muslim. Ledakan itu menyulitkan pemerintah Mesir, mengingat sektor turisme menyumbang devisa terbesar kedua setelah Terusan Suez, yaitu sekitar 6,7 milyar US \$ per tahun.²⁹

Jika pada 1970-an, mayoritas anggota organisasi garis keras (militan) adalah mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi, pada 1990-an, mayoritasnya adalah siswa atau lulusan sekolah menengah, yang secara usia umumnya di bawah 25 tahun.⁴¹ Mereka berasal dari kalangan yang dekat dengan kemiskinan. Di antara mereka adalah masyarakat urban baru yang tinggal di perumahan kumuh yang dibangun tanpa izin. Kondisi yang diakibatkan ketidakmampuan negara menyediakan infrastruktur ini menyuburkan frustrasi, ekstrimisme, kekerasan, dan kriminalitas. Di antara penduduk Kairo yang pada 1990-an akhir berjumlah sekitar 16 juta

misalnya, 5 juta jiwanya adalah penduduk miskin.

Membengkaknya kemiskinan ini salah satunya diakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi pemerataan ekonomi yang memadai. Pertambahan penduduk di Mesir adalah satu juta kelahiran dalam setiap 8 bulan. Sedangkan secara ekonomi, kebijakan investasi periode Sadat memang merangsang kemampuan industri dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi pun meningkat hingga 6% dengan rata-rata penurunan inflasi hingga kira-kira 10% dan defisit nasional menurun hingga 3,5%. Dari segi pemerataan, realitas ekonomi Mesir merupakan problem besar. Ekonomi rata-rata penduduk Mesir yang pada 1990-an akhir berjumlah sekitar 60 juta jiwa belum meningkat. Pendapatan per kapita pada 1979, misalnya hanya 500 US \$, padahal negara Arab tetangganya seperti Uni Emirat Arab pada 1980 sudah mencapai 30.070 US \$, Qatar 26.080 US \$, dan Saudi Arabia US \$ 11.260, sebuah kondisi ekonomi yang sangat kontras.²²

Karena itu, setelah terbunuhnya Faraj Fuda, Mubarak mulai memburu kantong-kantong kaum fundamentalisme di Kairo dan Mesir Hulu. Selain itu, penyebaran informasi yang menentang terorisme dan fundamentalisme melalui buku-buku dan bahan-bahan pendidikan dilakukan. Pers, media negara, tokoh agama dan cendekiawan ikut terlibat. Biasanya mereka mengutip dimensi-dimensi liberal Islam dengan bertumpu pada ayat atau Hadis tertentu. Simposium dan sejenisnya diadakan, dan larangan yang dikeluarkan al-Azhar terhadap buku karya cendekiawan terkenal semisal al-Asymawi dan Faraj Fuda dianggap tidak berlaku, sehingga bisa ikut dalam pameran buku internasional pada 1993. Dua orang cendekiawan ini secara tegas menolak pemerintahan Tuhan (teokrasi) yang menurut kaum fundamentalis Mesir seperti M. al-Ghazali, Muslim yang menyingkirkan syaria'ah dengan dalih pemisahan agama dan politik adalah murtad.²³ Kebalikan dari al-Ghazali, al-Asymawi dan Faraj Fuda melihat bahwa teokrasi merupakan

hal yang keliru secara Islam dan sebagai cara untuk menutupi kecenderungan totaliternya dengan konsep *istmah* (suci dari dosa). Pada Oktober 1992, Mubarak mengeluarkan perintah setingkat undang-undang yang mengizinkan pengadilan militer walaupun mereka warga sipil. Mubarak juga memperkenankan pengadilan singkat yang tidak memberikan hak banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Sejak itu hingga akhir 1993, lusinan hukuman mati dikeluarkan untuk melawan para fundamentalis yang melakukan kekerasan dan lebih dari 25 orang telah dieksekusi. Menurut catatan organisasi HAM Mesir, Mubarak telah melakukan kekerasan politik pada tahun-tahun itu terhadap sekitar 1200 jiwa.

Para cendekiawan liberal dan sekuler seperti Sa'adudin Ibrahim mendukung langkah Mubarak. Bahkan, menurutnya, untuk menghalau fundamentalisme Islam yang sering melakukan tindak kekerasan atas nama agama yang anggotanya pada 1990-an akhir sekitar 10.000 orang, sistem

pendidikan harus sepenuhnya dirumuskan kembali dengan merevisi total kurikulum dan mengganti semua guru yang mendukung fundamentalisme. Alasannya karena mereka telah mengontrol berjuta-juta anak sekolah dengan melakukan terus menerus cuci otak. Kecuali itu, penting juga dilakukan program-program yang bertujuan menghalau laju fundamentalisme yang disiarkan media elektronik (radio dan televisi).²⁴

Akibat dari meningkatnya aktivitas kaum fundamentalis Islam dalam melakukan tindak kekerasan, maka pada periode Mubarak ini, demokrasi dan hak-hak sipil pun menjadi problem. Najib Mahfuz (1911-2006), sastrawan yang mendapat hadiah Nobel pada 1980-an merasakan hal ini. Sebagai pengarang yang ingin merayakan kebebasan berpikir, Mahfuz merasa terjeprit di antara sensor pemerintah dan kaum militan. Di satu sisi pemerintah menerapkan sistem yang membekukan penalaran publik. Misalnya, oposisi secara terang-terangan diberangus, lawan-lawan politik ditangkap, dan hingga kini

UU darurat perang belum dicabut. Di sisi lain kaum militan Islam atas nama Tuhan melakukan teror dan sensor terhadap mereka yang keyakinannya dianggap menyimpang dan menodai agama (tradisional atau literal). Ahli kajian Timur Tengah dari Universitas John Hopkins, Fuad Ajami, menjelaskan bagaimana para sastrawan dan intelektual Mesir cenderung menjadi target kedua sensor, meski mereka tetap berjalan di atas prinsip-prinsipnya.

Najib Mahfuz umpamanya, mengalami teror dari kaum fundamentalis berupa percobaan pembunuhan pada 14 Oktober 1994, di mana ia setelah dibawa ke rumah sakit selamat dari kematian, meskipun tangan kanannya lumpuh. Setelah peristiwa ini, pemerintah mengumumkan bahwa Jama'ah Islamiyah dituduh sebagai dalangnya. 7 anggota kelompok ini ditangkap dan 8 orang ditembak mati polisi, sementara 16 orang lainnya diajukan ke pengadilan. Mahfuz sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya dimainkan

pemerintah. Boleh jadi tentara memanfaatkan momen tersebut untuk menangkapi kelompok Jama'ah Islamiyah.²⁵ Mahfuz seringkali rindu pada kebebasan seperti periode demokrasi liberal sebelum 1952 yang tidak didapalnya pada periode Mubarak. Hal ini karena situasi politik yang memberi angin kebebasan baginya lebih memberi kemungkinan berkembangnya peradaban (kebudayaan tinggi). Menurutnya, film-film tahun 1930-an di mana berlaku sistem demokrasi liberal lebih baik ketimbang produksi film Mesir masa kini.²⁶

Situasi terjepit sensor kaum fundamentalis atau pemerintah Mubarak lewat konservatisme Islam juga dialami Nawal el-Sadawi. Novelnya berjudul *Suqut al-Imam* (Jatuhnya Sang Penguasa) sekitar Juni 2004, oleh Rezim Mubarak diberangus. Nawal el-Sadawi menganggap keputusan itu sebagai keputusan lucu, karena novel ini sudah beredar 20 tahun lalu dan telah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa. Novel yang ditulis ketika penulisnya berada di penjara itu diilhami tewasnya Sa-

dat. Novel ini menceritakan seorang imam (pemimpin) di suatu daerah yang mengklaim sebagai wakil Tuhan di bumi. Dia menindas dan memperdaya rakyatnya atas nama Tuhan. Ternyata imam yang dipuja-puja rakyatnya itu memiliki anak di luar nikah. Borok itu tercium ketika sang anak dikejar-kejar polisi, karena dituduh sebagai pembunuh. Sebagai imam, tokoh itu mati dengan sangat tragis, karena ditembak anaknya sendiri dalam suatu perayaan kemerdekaan negaranya.

El-Sadawi dalam novel ini mengungkapkan kemunafikan pemimpin dan membongkar penggunaan agama untuk tujuan kotor. Novel ini oleh al-Azhar yang memiliki hak untuk menyeleksi semua buku yang beredar, berdasarkan UU No. 103 tahun 1961 pasal 15, dianggap melanggar prinsip-prinsip agama.²⁷

Walaupun begitu, demokrasi di Mesir pada periode Mubarak bukan berarti tidak memiliki prospek yang baik. Setelah 12 tahun berkuasa sejak Oktober 1981, pada 1993-an terdapat 13 partai. Meski Mubarak tidak memperke-

nakan kelompok-kelompok keagamaan menjadi partai, baik Ikhwan maupun Koptik, bahkan Nasseris paling tidak sampai pemilu 1991, tetapi pada 1984 Mubarak mengizinkan Ikhwan di bawah kepemimpinan al-Tilimsani bergabung dengan Partai Wafd. Partai ini memperoleh 65 kursi dari 450 kursi yang diperebutkan, 7 di antaranya untuk Ikhwan. Pada pemilu 1987, mereka beraliansi dengan Partai Buruh Sosialis, yang karenanya pada tahun itu terdapat 50 wakil Ikhwan dalam Majelis Rakyat. Tentu saja motivasi Mubarak melakukan hal itu bukan saja demokratisasi, melainkan juga dukungan politik masyarakat Muslim di tengah memburuknya situasi sosial, ekonomi, dan politik yang disebabkan antara lain manajemen politiknya yang korup.²⁸ Namun, di samping oposisi Islam mau bekerjasama dalam sistem politik yang ada, antara oposisi Islam dengan pihak sekular dapat melakukan tawar-menawar politik. Ikhwan pun pada periode ini menyerukan kesetaraan penuh hak dan kewajiban antara kaum Muslim dan kaum Kristiani Koptik.

Pada periode Mubarak kebebasan pers agak luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti perampasan terhadap pers asing yang meliputi pelanggaran HAM, terutama penykisaannya terhadap kaum fundamentalis, Mubarak tidak menggunakan kekuasaannya untuk mencabut izin terbit jurnal atau majalah. Selain Beirut, pers Mesir pada 1990-an merupakan yang paling bebas di dunia Arab. Mubarak juga memberikan izin kebebasan relatif bagi asosiasi pengacara, para cendekiawan, dan organisasi hak asasi Arab dan Internasional, seperti Amnesty Internasional, Middle East Watch, dan Arab Organization for Human Right. Mereka dikenal sebagai benteng liberalisasi politik yang berperan dalam proses demokratisasi.²⁹

Peristiwa terakhir yang memperlihatkan prospek demokrasi di Mesir di masa Mubarak adalah reformasi dalam pemilihan presiden. Ia telah melakukan referendum pada 26 Mei 2005 mengenai amandemen Konstitusi No. 76 yang disetujui mayoritas rakyatnya. Berdasarkan amandemen itu,

pemilu presiden September 2005 diselenggarakan dengan multikandidat. Pemilu dengan calon presiden lebih dari satu orang adalah yang pertama sejak 1952. Langkah itu bisa dikatakan sebagai kebangkitan demokrasi yang tidak liberal. Mubarak mampu mempertahankan kekuasaannya, dan mendapatkan nilai politis dari sekutunya, Amerika Serikat. Karena itu, kubu oposisi (Partai Neo Wafd yang liberal,³⁰ Tajamut', dan Nasseris yang kiri) menuntut tidak hanya amandemen Konstitusi No. 76, melainkan juga No.77 dengan membatasi masa jabatan hanya dua periode saja dan menghapus UU Darurat yang diberlakukan sejak 1958 yang diperkuat UU Darurat 1981. Hal ini karena UU Darurat sering dipakai pemerintah untuk mencegah unjuk rasa dan menciduk aktivis anti pemerintah. Selain itu Ikhwan al-Muslimin menuntut pemerintah untuk merehabilitasi organisasinya yang terlarang sejak 1954. Alih-alih memenuhi tuntutan oposisi, pemerintah selama dua pekan pelaksanaan amandemen Konstitusi 76 itu menangkap sekitar

850 aktivis Ikhwan sebagai kekuatan politik yang memiliki massa paling riil.³¹

Hasil amandemen itu, Mubarak memenangkan pemilu 7 September 2005 dengan 88,6% suara, walaupun sebelumnya dituntut mundur sekitar 700 politisi, aktivis, dan cendekiawan yang mengeluarkan petisi dan ditolak mayoritas (90,7%) responden dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Aljazeera Net. Saingannya, Ayman Nour dari Partai al-Gad memperoleh 7,3% suara dan Nu'man Jum'ah dari Partai Wafd 2,8% suara. Salah satu faktor kemenangannya adalah sistem multikandidat yang digagasnya diputuskan mendadak sehingga kelompok oposisi kelabakan, tidak memiliki persiapan yang matang. Selain itu, pemilu tersebut dinilai kurang *legitimate*, karena rendahnya persentase keikutsertaan rakyat, yaitu hanya diikuti 23% rakyat yang berhak memilih.³²

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan yang bisa diambil adalah, meski sama-sama elite dari Gerakan Perwira

Bebas yang berhasil menggulingkan monarki yang didirikan M. Ali, Sadat berbeda dengan Nasser. Jika Nasser lebih dekat dengan Rusia dan ideologi sosialisme Arab, maka Sadat lebih dekat ke Amerika Serikat dan ideologi kapitalisme semu, yaitu sistem ekonomi pasar yang memberi ruang bagi pasar atau swasta, meski intervensi rezim Sadat berdasarkan pertimbangan pragmatis tetap dominan. Namun, keduanya mengembangkan sekularisme secara rigid, dalam arti pemisahan agama dan negara. Karena itu, partai politik berdasarkan agama di masa keduanya dilarang. Kecenderungan terhadap sistem ekonomi pasar lewat kebijakan *infirah* itu mengakibatkan Mesir terutama kota besarnya seperti Kairo banjir institusi kebudayaan Barat modern seperti *night club*, bar, dan lain-lain. Kondisi ini dan realitas kesejahteraan rakyat yang masih jauh panggang dari api menyuburkan tumbuhnya gerakan fundamentalis Islam. Misalnya Jama'ah Islamiyah yang cabangnya di Indonesia hingga hari ini relatif berkibar dan Tanzim al-Jihad yang sa-

lah satu anggotanya. Khalid Islambuli, berhasil membunuh Sadat pada 6 Oktober 1981.

Organisasi militan Islam yang lahir pada masa Sadat ini pada periode Mubarak terus hidup, bahkan radikalismenya semakin menjadi-jadi dan anggotanya pun banyak dari alumni sekolah menengah. Peristiwa pemboman kota wisata Syarm al-Syaikh, 23 Juli 2005 yang menewaskan 88 orang dan terbunuhnya banyak pejabat pemerintah serta tokoh intelektual liberal menunjukkan asumsi itu. Tentu saja merebaknya terorisme terutama di daerah wisata menyulitkan Mesir, mengingat sektor pariwisata menyumbang devisa terbesar kedua setelah Terusan Suez. Sebab itu, perburuan terhadap kelompok Islam militan atau teroris itu pada periode Mubarak dilakukan dengan serius hingga ke hulu sungai Nil dan upaya untuk meng~~count~~mentenya pun dilakukan juga.

Meski Mubarak menerapkan sistem politik demokrasi, tetapi demokrasi prosedural, sebagaimana Indonesia pada zaman Orde Baru. Karenanya, kendati berlaku sistem

multipartai, tetapi partai yang dominan yang mendapat prioritas adalah partainya sendiri, National Democratic Party (NDP). Selain itu, di tangan Mubarak juga terakumulasi kekuasaan, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif hingga ke daerah-daerah; tidak adanya kebebasan berkarya, baik karena pembatasan yang lahir dari pemerintah maupun dari kaum fundamentalis Islam; dan pada masanya juga, sebagaimana masa sebelumnya, banyak sekali kalangan Islam militan (politik) yang masuk penjara. Mereka umumnya diadili dalam pengadilan militer dan bersifat kilat.

Namun demikian, pada periode Mubarak, di Mesir terdapat kebebasan pers, kebebasan berserikat secara relatif, adanya wakil independen di parlemen yang diisi oleh wakil Ikhwan al-Muslimin yang beraliansi dengan partai sekular, dan belakangan adanya pemilu presiden secara langsung dengan multikandidat. Akan tetapi, tentu saja hal ini adalah kebangkitan demokrasi yang tidak liberal, yang dengan itu rezim Mubarak bukan saja mampu mempertahankan

kekuasaannya, tetapi juga mendapatkan nilai politis dari sekutunya, Amerika Serikat. Karena itu, kubu oposisi menuntut pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode saja dan menghapus UU Darurat yang diberlakukan sejak 1958 yang sering dipakai pemerintah Mubarak untuk mencegah unjuk rasa dan menciduk aktivis anti pemerintah.

Catatan Akhir

1. Parsudi Suparlan, Ilmu Pengetahuan, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Etika Akademik, *Makalah Workshop Etika Akademik Global*, Jakarta: Depag RI, 11 Oktober 2004.
2. Lihat www.unimelb.edu.au dan brosurinya.
3. Ia merupakan penerus Dinasti Muhammad Ali, perwira berkebangsaan Turki yang berkuasa di Mesir pada 1805-1849 atas dukungan ulama al-Azhar, setelah terjadi kekosongan kekuasaan sejak keluarnya Prancis dari Mesir pada 1801.
4. Partai ini didirikan oleh Sa'ad Zaglul pada 1919 dan berkembang menjadi partai populer. Partai ini memenangi Pemilu Nasional I 1924 di bawah Konstitusi 1923, saat dipimpin Mustafa Nahas memenangi Pemilu 1928 dan 1930. Arti *wafd* adalah utusan, yaitu utusan yang ditunjuk kaum Nasionalis Mesir

yang dipimpin Sa'ad Zaglul untuk menghadiri Konferensi Perdamatan di Prancis yang kemudian melahirkan Revolusi 1919. Selain Partai Wafd, partai yang ikut terlibat selama periode liberal di Mesir adalah: Partai al-Watani (Nasionalis) dan al-Sa'diyyin (Kelompok Sa'ad) yang juga nasionalis, al-Ahwar al-Dusturiyyin (Merdeka Konstitusionalis) yang liberal konstitusional, hampir sama dengan Wafd, Ikhwan al-Muslimin (Persaudaraan Muslim) yang berideologi Islam, Partai al-Isytiraki (Sosialis), dan Partai al-Suyu'i (Kommunis). *Wafd* dalam www.redcross.org, diakses 15 Mei 2006 dan Isma'il Ahmad Ya'i dan Mahmud Syakir, *Tarikh al-Islam al-Islami al-Hadisi wa al-Mu'asirah (Qarah Ihtiyah)*, Jilid II, Riyad: Ipn, Tth. H. 32-41.

5. Mesir dikuasai Iskandar Agung (332 SM), Romawi (30 SM) Octavian (Augustus), Arab/Islam (masa Umar ibn Khattab 640 M), Dinasti Umayyah (661 M), Abbasiyah (750 M), Tuluniyah (868 M), Ikhsyidiyah (935 M), Fufimiyah (969 M), Ayyubiyah (1171 M), Mamalik (1250 M), Turki Usmani (1571 M), dan Dinasti Muhammad Ali (1805 M). Lihat *Encyclopedia of Orient*, dalam www.lexiconorient.com, diakses 15 Mei 2006.
6. Grolier International Inc., *Negara dan Bangsa, Afrika*, Jilid I, Jakarta: Widyakara, Edisi ke-7, 2003, h. 118, Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, Terj. dari *A History of The Arab Peoples*, Bandung: Mizan, 2004, h. 712-713, dan *The Encyclo-*

pedia Americana, International Edition, New York Americana Corporation, 1974, h. 17.

7. Sosialisme Arab ini lebih tepat dipahami sebagai pembangunan ekonomi yang disponsori negara. Konsepnya berawal dari diktator proletariatnya Marx, bukan kepemilikan sepenuhnya terhadap sarana-sarana produksi oleh negara demi lahimnya masyarakat sama rata sama rasa (komunisme), sebagaimana yang terjadi di Eropa Timur yang Marxis, terutama Uni Soviet. Alasannya karena dalam batas-batas tertentu, Mesir pada masa Nasser masih mempertahankan sektor-sektor swasta. Peran negara dalam pelayanan sosial, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan dalam sosialisme Arab menjadi lebih tinggi. Sosialismenya dalam hal ini lebih bermakna doktrin yang menekankan pentingnya negara mewujudkan keadilan sosial terutama lewat penguasaan alat-alat produksi terpenting. Tampaknya, hal itu dipengaruhi semacam konsensus luas pasca Perang Dunia I di kalangan kelas berpendidikan dan kelompok oposisi tak resmi di setiap negara bahwa kebutuhan mendasak adalah kemerdekaan nasional dan pembangunan ekonomi, di mana negara merupakan wahana alamiah untuk menjalankan perubahan. Menurut Jamal Abdul Nasser sendiri, sosialisme yang dimaksudnya adalah sosialisme yang menentang kolonialisme Barat, feodalisme (kaum feodal yang jumlahnya tak lebih dari 5 % rakyat), kelom-

- pok kapitalis, mengembangkan kehidupan demokras, percaya pada kepemilikan individu yang mengakui hak-hak sosial, dan percaya pada agama. Nasser pun mencari pembenaran atas ideologinya lewat Hadis: *Manusia berserikat dalam 3 hal: air, rumput, dan api*. Karena itu, nabi Muhammad saw dinilainya sebagai seorang sosialis. Dalam praktik, konsepnya itu tentu saja jauh panggang dari api. Lihat Hamdi Hafiz, *al-Isytirākīyah wa at-Talbiq al-Isytirākī fi al-Jumhūriyah al-Arabīyah al-Muttaḥidah*, Kairo: al-Dar al-Qaumiyyah, th., h. 165, 151-157, dan John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Terj. dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Bandung Mizan, 2001, h. 166.
8. Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.
 9. Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian I dan II, Terj. dari *A History of Islamic Societies*, Jakarta: Rajawali Pers 2000, h. 123, 126-127, M. Haikal, *Anwar Sadat, Kemarau Kemarahan*, Terj. dari *Autumn of Fury*, Jakarta: Grafiti Press, 1986, Cet. Ke-2, h. 75-76, 89, dan Retno Suffatni (ed.), *Tokoh-Tokoh Tak Terlupakan*, Yogyakarta: LKiS, 2003, h. 264, 279.
 10. Dua perliga wilayah diserahkan kepada Mesir pada 1980 dan sisanya tahun 1982.
 11. B. Setiawan (ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988, Jilid II, h. 210-211 dan Grolier International Inc., *op. cit.*, h. 107
- dan Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.
12. Majalah *Tempo*, 1 Oktober 2000, h. 65.
 13. John L. Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Terj. dari *Islam and Democracy*, Bandung: Mizan, 1999, h. 235-236, John L. Esposito, *Ancaman Islam, Mitos atau Realities*, Terj. dari *The Islamic Threat: Myth or Reality*, Bandung: Mizan, 1996, h. 170, 179, dan M. Haikal, *op. cit.*, h. 65.
 14. John L. Esposito, *Ensiklopedi*, Jilid 1, *op. cit.* h. 232 dan Jilid 2 h. 273, Ian Adam, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Terj. dari *Political Ideology Today*, Yogyakarta: Qalam, 2004, h. 435, Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Terj. dari *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, h. 292-293, dan David Sagiv, *Islami Otentisitas Liberalisme*, Terj. dari *Fundamentalism and Intellectual in Egypt, 1973-1993*, Yogyakarta: LKiS, 1995, h. 53-54, 219, 231.
 15. *Ibid.*, h. 50-76, Ira M. Lapidus, *op. cit.*, h. 131-133, dan Halah Mustafa, *al-Islām al-Siyāsī fi Miṣra, min Ḥarakah al-Islāh ilā Jamā'at al-Urf*, Kairo: Maktabah al-Ustāh, 2005, h. 178-224.
 16. Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.
 17. *Ibid.*

18. Grolier International Inc., *op. cit.*, h. 118, *Kompas*, 6 Maret 2005, h. 4 dan Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.
19. *Ibid.*
20. Grolier International Inc., *loc. cit.* dan Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006, David Sagiv, *op. cit.*, h. 211-212, dan *Kompas*, 6 Maret 2005, h. 4, *Kompas*, 24 dan 26 Juli 2005, dan *Kompas*, 23 Desember 2003.
21. Sa'aduddin Ibrahim, *Egypt, Islam, and Democracy*, Kairo: The American University, 1996, h. 74.
22. Chadly Fitouri, Education in The Arab World, dalam Michael Adams, *The Middle East*, New York: Facts and File, 1988, h. 790.
23. Bassam Tibi, *op. cit.*, h. 292.
24. David Sagiv, *op. cit.*, h. 212-218.
25. *Tempo*, 1 Oktober 2000, h. 64.
26. *Ibid.*, h. 66.
27. *Gatra*, 12 Juni 2004, h. 89-91.
28. Indeks Persepsi Korupsi 2005, Mesir termasuk negara terkorup peringkat ke-15 dengan nilai 3,4, lebih bersih sedikit dari Indonesia yang nilainya hanya 2,2. www.transparency.org.
29. Sa'aduddin Ibrahim, Krisis Elite dan Demokratisasi di Dunia Arab, dalam *Islamika*, No. 4, April-Juni 1994, h. 3-13, David Sagiv, *op. cit.*, h. 103-144, 220-234, Albert Hourani, *op. cit.*, h. 730, dan John L. Esposito, *Ensiklopedi*, Jilid 2, *op. cit.*, h. 273.
30. Partai ini didirikan Siraj al-Din, veteran Partai Wafd yang dibu-

- arkan pada 1953. Perbedaan partai ini dengan Partai Wafd adalah fokusnya. Jika sebelumnya fokus perjuangannya pada kemerdekaan Mesir, maka partai ini memfokuskan diri pada sekularisme, hak-hak perusahaan swasta, dan berhubungan erat dengan kekuatan Barat dan Amerika Serikat dibanding dengan Rusia. Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.
31. *Kompas*, 27 Mei 2006.
 32. *Kompas*, 26 Oktober 2004, 28 Februari, 2005, dan 10 September 2005 serta Encyclopedia of Orient, dalam www.lexicorient.com, diakses 15 Mei 2006.

Daftar Pustaka

- Adam, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Terj. dari *Political Ideology Today*, Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Brosur Universitas Melbourne
- Esposito, John L., *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas*, Terj. dari *The Islamic Threat: Myth or Reality*, Bandung: Mizan, 1996.
- , dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Terj. dari *Islam and Democracy*, Bandung: Mizan, 1999
- , *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Terj. dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Bandung: Mizan, 2001.
- Fitouri, Chadly, Education in The Arab World, dalam Michael

- Adams, *The Middle East*, New York: Facts and File, 1988.
- Grolier International Inc., *Negara dan Bangsa, Afrika*, Jilid 1, Jakarta: Widyakara, 2003.
- Hafiz, Harndi, *al-Isytirakiyah wa at-Tatbiq al-Isytiraki fi al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Muttahidah*, Kairo: al-Dar al-Qau-miyah, tth.
- Haikal, M., *Anwar Sadat, Kemarau Kemarahan*, Terj. dari *Autumn of Fury*, Jakarta: Graffiti Press, 1986.
- Hourani, Albert, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, Terj. dari *A History of The Arab Peoples*, Bandung: Mizan, 2004.
- Ibrahim, Sa'aduddin, Krisis Elite dan Demokratisasi di Dunia Arab, dalam *Islamika*, No. 4. April-Juni 1994.
- , *Egypt, Islam, and Democracy*, Kairo: The American University, 1996.
- Kompas*, 23 Desember 2003
- , 26 Oktober 2004
- , 28 Februari 2005
- , 6 Maret 2005
- , 24 Juli 2005
- , 26 Juli 2005
- , 10 September 2005
- , 27 Mei 2006
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian I dan II, Terj. dari *A History of Islamic Societies*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Gatra*, 12 Juni 2004.
- Tempo*, 1 Oktober 2000.
- Mustafa, Halah, *al-Islām al-Siyāsī fi Miṣra, min Ḥarakah al-Islāh ilā Jamā'at al-Uḥf*, Kairo: Maktabah al-Uṣrah, 2005.
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Terj. dari *Fundamentalism and Intellectual in Egypt, 1973-1993*, Yogyakarta: LKIS, 1995.
- Setiawan, B. (Ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988.
- Suffani, Retno (Ed.), *Tokoh-Tokoh Tak Terupakan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Suparlan, Parsudi, Ilmu Pengetahuan, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Etika Akademik, *Makalah Workshop Etika Akademik Global*, Jakarta: Depag RI, 11 Oktober 2001.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme*, *Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Terj. dari *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- The Encyclopedia Americana, International Edition*, New York: Americana Corporation, 1974
- www.lexicorient.com
- www.redcross.org
- www.transparency.org
- www.unime1b.edu.au
- Ya'i, Isma'il Ahmad dan Mahmud Syakir, *Tārīkh al-Ālam al-Islāmī al-Ḥadīṣ wa al-Mu'āṣirah (Qarah Iḥlūqiyah)*, Jilid II, Riyad: Tpn, Tth.